

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG

Siti Widharetno Mursalim
Universitas Sangga Buana YPKP Bandung
e-mail : siti.widharetno@yahoo.com

Abstrak

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia's Tech Ecosystem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai Smart City dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, smart city

Implementation Of Smart City Policy In Bandung City

Abstract

Smart City is one of the development and management strategies that can be implemented in the new city. Smart city is a smart city concept designed to help various community activities and provide easy access to information to the public. This concept emphasizes on three concepts, first, a concept applied by the local government system in managing urban society, the second, a concept that required the management of the region against all resources effectively and efficiently and the the last is smart city is expected to be able to carry out the information provider function appropriately to the community and be able to anticipate unexpected events. The focus of this research is in Bandung City which has won the event of Smart City Award 2015 held by Asia's Tech Ecosystem magazine. Given that the concept of Smart City is still growing in the process of development and management of cities in Bandung then it is necessary to do a research about this subject. This study uses descriptive analysis by conducting interviews and literature studies, which from the results it can be seen that the socialization of Smart City has not spread evenly, there are still problems related inadequate infrastructure, lack of apparatus understanding about Smart City and Operational System Procedures that only refers to Roadmap Mayor of Bandung .

Keywords: Implementation, Policy, Smart City.

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan mengenai Smart City yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Balai Sidang Jakarta pada 24 Maret 2015. Program tersebut adalah salah satu cara dalam rangka

peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan

kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan berkembangnya media dan teknologi, kini Bandung sebagai Kota yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang lebih mumpuni. Untuk itu, dizaman yang serba digital ini, kemampuan pengawasan dari pihak Pemerintah Kota perlu diupgrade. Dengan adanya pengawasan kota secara realtime sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota tengah mengembangkan suatu konsep pengawasan dengan adanya Bandung Smart City, dimana semua Dinas di Pemerintah Kota Bandung terawasi dengan baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menginginkan agar setiap daerah menerapkan konsep 'Smart City' atau kota cerdas untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dikutip dari laman smartcityindonesia.org, sebuah kota bisa dikatakan smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota didalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan.

Smart City atau kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Prof. Suhono Harso Supangkat dkk)

Di bawah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, kota Bandung sangat serius membawa jargon *Smart City*. Dengan lebih dari delapan juta orang penduduk, Bandung adalah kota terbesar ketiga di Indonesia, di bawah Jakarta dan Surabaya. Populasi penduduknya yang muda dan melek teknologi semakin mendukung ekosistem teknologi di Bandung. Menurut Ridwan Kamil, 60 persen warga Bandung berusia di bawah 40 tahun yang merupakan usia produktif untuk bekerja. Bandung juga merupakan kota dengan basis pengguna Twitter terbesar keenam di dunia.¹

¹(Diakses dari <https://lestarinurbudi.wordpress.com/2016/06/08/bandung-smart-city/a>).

Saat ini Kota Bandung memiliki Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas atau biasa disebut dengan Dewan Smart City. Dewan tersebut terdiri dari berbagai elemen yang ada di masyarakat Kota Bandung maupun pemerintah Kota Bandung.

Untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota berlabel Smart City tidaklah mudah, sehingga dalam Implementasi Kebijakan Smart City masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung seperti yang terlihat dalam Gambar berikut :



Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2016.

Gambar 1
Problem Smart City di Kota Bandung

Permasalahan pertama terkait komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kota Bandung belum merata di setiap wilayah daerah serta kebijakan tersebut belum seluruhnya diterapkan oleh kabupaten / kota .

Padahal Sosialisasi mengenai Smart City telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung salah satunya dengan diadakannya Smart City Forum yang dilaksanakan di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat 2 September 2016 oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung. Smart City Forum yang dihadiri oleh 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 Kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam rangka mendukung penerapan Smart City di daerah, Kota Bandung telah menghibahkan 9 aplikasi untuk memudahkan pelayanan di masing-masing daerah. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Smart City belum seluruhnya diterapkan oleh beberapa wilayah daerah di Bandung, karena berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya faktor infrastruktur di daerah yang belum memadai, seperti masalah kabel jaringan (koneksi) yang saat ini masih

belum merata secara keseluruhan di beberapa daerah di kota Bandung. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki infrastruktur jaringan melalui pembangunan daktin ,yaitu penurunan kabel-kabel listrik melalui pipa ke dalam bawah tanah serta membuat MCF (microcellful), gunanya untuk penyebar sinyal HandPhone. Pembangunan daktin dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta memperindah estetika tata ruang kota agar terlihat rapi.

Selain itu, sosialisasi yang belum merata di setiap wilayah daerah disebabkan oleh masyarakat yang belum melek teknologi . Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga informasi tidak tersampaikan. Padahal berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mensosialisasikan Penerapan Smart City di masyarakat yaitu melalui berbagai media seperti, media cetak, online, radio, TV.

Seperti yang dipaparkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dia menjelaskan, Pemerintah Kota telah berupaya membuat masyarakat Bandung melek internet dengan menyediakan jaringan internet gratis di seluruh penjuru Bandung. Tidak hanya itu, menurutnya, saat sudah melek internet, Pemerintah Kota Bandung akan berupaya agar masyarakat mau melaporkan segala keluhan melalui layanan internet. Pemerintah juga menggelar pelatihan internet di Universitas Maranatha untuk para Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan selanjutnya mengenai Sumber Daya, Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam mencapai terlaksananya Smart City, tetapi faktanya penempatan pegawai di Pemerintahan belum sesuai dengan skill yang dimiliki. Baru dalam tahap penempatan SDM yang handal dibidang teknologi (IT) sehingga untuk pembenahan dan kelancaran program smart city, Pemerintahan Kota Bandung merekrut tenaga out sourcing khususnya dalam bidang IT . Perekrutan ini sangat ketat dari seribu pendaftar hanya 5 orang saja yang diterima karena mereka merupakan pegawai yang handal dibidang IT.Pegawai yang ahli di bidang IT ini sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Smart City seperti yang disampaikan oleh Kepala Sarana Prasarana Telematika dan Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung.

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang sulit untuk diubah, terutama hal terkait perilaku. Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi. Misalnya, dalam hal perizinan, masih banyak aparat Pemerintah Kota yang bekerja terlalu lamban. Sehingga, Walikota yang harus turun tangan sendiri ke lapangan untuk sidak.

Perilaku birokrasi sangat berpengaruh dalam membangun sebuah Kota yang Smart, sehingga dalam pelaksanaan program Smart City menjadikan kota yang efisien untuk masyarakat, kota yang layak tinggal, pelayanan publik terjadi dengan baik, tingkat perekonomian tinggi, serta tingkat infrastruktur kota tertata dan rapih. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung ingin mewujudkan itu semua dengan membangun Smart People sebagai penunjang Smart City.Namun, Untuk menjadikan Smart People itu tidaklah mudah sehingga Walikota Bandung terlebih dahulu membangun Smart Government karena pemerintah sebagai implementor dalam Smart City.

Permasalahan terakhir mengenai struktur Birokrasi, untuk melaksanakan suatu kebijakan para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya belum semuanya memahami kebijakan yang dibuat, sehingga Pemerintah Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program Smart City tersebut bagi para pegawai khususnya pegawai yang berada di Dinas komunikasi dan Informatika karena Dinas ini sebagai implementor.

B. LANDASAN TEORETIS

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yaitu pada penelitian smart city diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Jenis Penelitian	Judul dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
Hafedh Chourabi, Tae woo Nam, Shawan Walker, J.Ramon GilGarcia, Sehl Mellouli, Karine Nahon, Theresa A. Pardo, dan Hans Jochen Scholl	Jurnal	<i>Understanding Smart Cities: An Integrative Framework</i> (2012)	Mengetahui kerangka atau ruang lingkup dalam memahami konsep <i>smart cities</i> .	Studi Literatur	Konsep smart city dipahami melalui kerangka atau ruang lingkup yang dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor luar dan dalam. Faktor dari luar meliputi pemerintah, individu, dan komunitas, lingkungan alam, infrastruktur, dan ekonomi. Adapun faktor luar meliputi teknologi, pengelolaan, dan kebijakan.
Dwita Widyaningsih	Tesis	Kota Surabaya Menuju Smart city (2013)	1. Merumuskan tahapan-tahapan pembangunan dalam proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city 2. Menemukan struktur (pondasi/pilar) proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city	Deskriptif Kualitatif	Smart city di Kota Surabaya sudah mulai diterapkan dalam 6 komponen <i>smart city</i> yaitu <i>smart government, smart living, smart environment, smart mobility, smart economy</i> dan <i>smart people</i> . Terdapat 4 fase pembangunan menuju smart city yaitu fase membenahan kinerja pemerintah, fase ke dua yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat, fase ketiga yaitu pengembangan pelayanan berbasis tik, dan fase yang terakhir yaitu pengembangan sistem dengan teknologi tinggi.
Andi Daido	Zulkifli Skripsi	Analisis Program Smart City di Kota Makassar. (2013)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik dengan sistem elektronik di kemas dalam program Smart City di Kota Makassar.	Deskripsi Kualitatif	Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan publik dengan sistem elektronik di Kecamatan Panakukkang yang ditunjuk sebagai Pilot Project belum berjalan. Hal ini diakibatkan oleh minimnya sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk implementasi dari program ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti komputer yang hanya ada satu unit per kelurahan, tidak adanya jaringan internet dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar kepada pemerintah di tingkat kelurahan turut menjadi penghambat dari implementasi program ini sehingga aparat ditingkat kelurahan tidak mampu untuk mensosialisasikan program Smart City kepada masyarakat. Padahal jika pelayanan publik secara elektronik berhasil dilaksanakan, maka pelayanan publik di tingkat kelurahan akan menjadi efektif dan efisien. Dalam hal ini diketahui bahwa keberhasilan smart city harus di dukung oleh sumber daya yang mampu terhadap teknologi juga kebutuhan akan teknologi berserta sumber daya perlatan pun harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Bardach yang dikutip oleh Agustino (2006:138) dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" sebagai berikut :

"implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien."

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Pengertian implentasi kebijakan menurut Mufizz yang dikutip oleh kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)" sebagai berikut :

"Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya."

Model implementasi kebijakan yang bersifat top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dikenal dengan "direct and indirect impact on implementation" terdapat empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat tiga indicator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino mengemukakan 3 variabel tersebut yaitu :

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seiring terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adalah salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus di lalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang di harapkan terdirtosi di tengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oeh pelaksana kebijakan (street/level bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu / mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah rubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People". Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan :

"kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif".

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi

kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edwards III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas".

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat di katakan berhasil.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini menurut Sugiyono, yaitu:

"Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain." (Sugiyono, 2007:11).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan smart city.

Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Pada teknik analisis data analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu :

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data.
- b. Penyajian data. Penyajian data adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya.
- c. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.²

Pada penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan bertanya langsung kepada informan yang memiliki data lengkap mengenai Smart City Kota Bandung.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai "gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3)

². Lexy J. Moleong 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 330

triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.”³

Penelitian ini mengkombinasikan tiga triangulasi, yaitu: Triangulasi Metode, Triangulasi antar Peneliti, dan Triangulasi Sumber Data. Dikarenakan penelitian yang dilakukan mencakup ke tiga hal triangulasi tersebut.

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, Triangulasi tahap ini dilakukan agar data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian tidak diragukan kebenarannya.
- b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu informan yaitu Kepala Sarana dan Prasarana Telematika serta Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informasi. Peneliti berpendapat bahwa teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Peneliti pun meyakini bahwa informan yang diwawancarai ini telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Pada penelitian ini selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, arsip yang diberikan informan berupa file dan CD (Complite Disc) yang merupakan dokumen sejarah mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika, dan gambar atau foto karena masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Konsep Smart City

³. Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 25 November 2016

Konsep Smart city antara lain yaitu :

- a. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup
- b. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya.
- c. Smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur social, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota.
- d. Smart city membuat kota lebih efisien dan layak huni.
- e. Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

Model Smart City

Menurut Suhono dkk, mengidentifikasi enam model smart city untuk membuat kesuksesan sebuah kota dalam menjalankan konsep smart city :

a. Smart Government

Smart Government atau pemerintahan yang cerdas adalah kunci utama dalam pembentukan Smart City. Pemerintah sebagai bagian dari fundamental sebuah negara, mempunyai tugas untuk membentuk paradigma atau pandangan kepada masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik. Pemerintah yang pintar merupakan pemerintah yang peduli dan transparan terhadap rakyatnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Pembentukan hukum yang jelas dan kebebasan berpendapat atau demokrasi juga perlu untuk diwujudkan guna menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Rencana pemerintah dalam meningkatkan struktur pembangunan yang nyata, mengendalikan arus ekonomi, serta pengelolaan sumber daya juga merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mulai mengurangi import dan mulai memanfaatkan hasil bumi yang didukung dengan sumber daya manusia asli dari putra

daerah. Dan yang terpenting dalam menciptakan Smart Government adalah terbentuknya karakter pemerintah yang profesional, bertanggung jawab dan bersih.

b. Smart People

Terbentuknya masyarakat yang madani dan sadar diri merupakan visi utama dari program Smart People for Smart City. Masyarakat madani yaitu sebuah kondisi dimana seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah kota sudah benar-benar menjadi insan yang berkompeten. Sedangkan sadar diri adalah sebuah pengertian dimana munculnya kesadaran dari dalam hati setiap manusia bahwa mereka adalah makhluk sosial, jadi apa yang mereka lakukan di dunia bukanlah hanya senantiasa untuk kepentingan dirinya pribadi, namun juga untuk kepentingan manusia yang lainnya, terciptanya sifat gotong royong, saling membantu, saling percaya, toleransi dan saling mengerti satu sama lain merupakan contoh sifat-sifat yang terlahir jikalau ada kesadaran dalam diri setiap manusia.

Dua kunci tersebut itulah jika bisa diraih maka akan tercipta yang disebut Smart People, karena manusia merupakan aktor utama dalam mewujudkan Smart City maka pencerdasan yang paling awal harus dimulai dari diri sendiri.

c. Smart Economy

Ekonomi pintar. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

d. Smart Mobility

Mobilitas pintar. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah system pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

e. Smart Living

Lingkungan pintar. Lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, berlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.

f. Smart Live

Hidup pintar. Manusia memiliki kualitas hidup terukur (berbudaya).

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung, jika dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward III terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian menurut teori Edward yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi, berikut implementasi kebijakan dari aspek-aspek tersebut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan, khususnya komunikasi yang terjalin antar para pelaksana kebijakan baik itu pelaksana dalam satu unit Dinas maupun pelaksana antar Dinas terkait. Disamping itu, komunikasi harus terjalin dengan baik antara para pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Kota Bandung. Implementasi kebijakan yang berjalan baik tidak terlepas dari faktor komunikasi yang baik pula. Komunikasi yang terjalin itu harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Komunikasi sangat berpengaruh pada terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak pula kepada hasil kebijakan yang akan dicapai.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tim dan juga antar badan instansi yang terkait sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing anggota internal dan antar badan instansi sehingga tidak adanya saling lempar tugas, harus saling seimbang dan jangan mau seenaknya.

Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bandung terdapat di dalam Roadmap Walikota Bandung, terdapat Roadmap jangka panjang dan jangka pendek. Kendala nya yaitu dalam mensosialisasikan Roadmap tersebut sehingga beberapa pegawai belum memahami.

Tabel 4.1
Roadmap Walikota Bandung

Program yang sudah terlaksana	Program yang sedang terlaksana	Rencana
Bandung Control Room	Kartu Bandung	Satu Bangku
Masjid/Gereja Net	(Angkot/Sepe da dll)	Satu Tablet
Wifi Di Kantor Pemerintahan	Media Kampanye	Lampu Caang Baranang (LED.Accu/Solar Cell)
Wifi Di Pusat Pariwisata	Bandung Smart City	Enerbike untuk Colokan
Wifi di Sentra Industri	Digitalisasi Dokumen	Listrik Pengembangan Kluster Industri ICT
Taman Wifi LAPOR (Citizen Reporting)	Surat, Disposisi dan Nota Dinas	
Krtu Parkir Prabayar	Bandung Best Apps	
1 Dinas 1 Akun Twitter/Facebook	Pelatihan Pemanfaatan ICT untuk	
Pajak Online Sabilulungan .net (Bansos dan Hibah Online)	Pemkot Bandung Pelatihan Pemanfaatan	
Redesign Website Pemerintah Kota Bandung.	Teknologi ICT untuk Masyarakat Ducting Bersama	

Sumber: Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2017

Informan mengatakan bahwa:

Bentuk sosialisasi mengenai Smart City kepada masyarakat Kota Bandung berupa menyampaikan informasi melalui Media Cetak, Radio, Televisi dan media Sosial Media.⁴

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menemukan masih banyak masyarakat Kota Bandung yang kurang mengetahui mengenai Smart City tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Mengenai sosialisasi Pemerintah Kota Bandung masih terus berusaha untuk mensosialisasikan Smart City salah satunya yaitu dengan meng-optimal kan penggunaan sosial media, Walikota Bandung yaitu Pak Ridwan Kamil sangat optimal

⁴. Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

dalam menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter dan Facebook beliau memiliki akun sendiri dan rajin mem-posting apapun program dan kegiatan yang sedang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Akun beliau pun memiliki banyak Followers atau pengikut. Seperti di akun instagram miliknya yaitu @ridwankamil, beliau memiliki 4,7 followers.

Sehingga pemanfaatan media sosial itu sangat efektif dalam mensosialisasikan mengenai Smart City.

Berikut paparan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

“Mengenai tahapan sosialisasi, Pemerintah Kota Bandung menggunakan berbagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi itu membutuhkan waktu, waktunya kurang lebih 2 tahun.”⁵

Walikota Bandung menugaskan seluruh komponen SKPD atau Dinas-dinas harus menjalankan Smart City dan mensosialisasikan mengenai program Smart City kepada daerah nya masing-masing yang terdapat di Kota Bandung agar sosialisasi atau penyuluhan mengenai Smart City lebih merata kepada seluruh kalangan masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi mungkin dapat dikerjakan secara cermat, jelas dan konsisten tapi jika kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi ini pun terbilang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya memiliki peran yang sangat penting didalam suatu instansi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya kebijakan merupakan faktor kritis atau lemah dalam melaksanakan kebijakan.

Sumber daya kebijakan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan secara lebih karena dengan tidak adanya sumber daya maka kebijakan hanya akan menjadi konsep atau rencana saja yang akan tidak memiliki pengaruh apapun terlebih dalam memecahkan permasalahan dilapangan. Kemampuan sumber daya dari pihak instansi akan sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial harus tersedia dan benar-benar dipersiapkan sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁵. Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Dalam indikator sumber daya ada 4 dimensi yang mempengaruhi sumber daya dalam implementasi kebijakan Smart City yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran dan keefektifan Implementasi kebijakan Smart City :

Yang pertama terkait dengan staff. Staff merupakan salah satu dari berbagai sumber daya yang keberadaannya paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu kebijakan tersebut efektif, demikian juga bila kekurangan.

Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.⁶

Pelaksanaan kebijakan Smart City di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Bandung belum cukup memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kualitas/kemampuan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala sub bagian umum Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota bahwa staff Dinas Komunikasi dan Informatika belum semuanya ahli dalam bidang Ilmu Teknologi padahal kemampuan atau keahlian ini sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan Smart City dimana Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah implementor yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan Smart City .

Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, yang membuat kebijakan mengenai smart city itu sudah sesuai yang mana kebijakan tersebut dibuat oleh Walikota Bandung yang mempunyai kualitas dan kapabilitas tinggi sehingga tidak akan asal dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya. Kualitas dan kapabilitas dapat diukur dari segi pendidikan pembuat kebijakan, seperti yang tertuang didalam Undang-undang No 8 tahun 2016 BAB VII, bagian kesatuan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota termasuk Gubernur/Walikota/Bupati adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat salah satunya berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Dalam hal pembuatan sebuah kebijakan harus diperhatikan beberapa hal,

⁶Dwiyanto Indiahono. Perbandingan Administrasi Publik. Bandung: Gava Media,2009.hal 48

seperti bagaimana adat atau kultur yang berada didaerah tersebut, naskah akademik yan paham benar dengan menyesuaikan seluk-beluk aspirasi daerah tersebut dan pembuatan kebijakan haruslah berorientasi kepada publik (*Public Interest*).

Kedua mengenai Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu implementasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Disposisi

Dukungan para pelaksana terhadap kebijakan smart city ini salah satunya para aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika merekrut tenaga-tenaga outsourcing untuk penunjang smart city, mereka para tenaga outsourcing ini membuat sistem dan mengendalikan sistem terutama yang berada di BCC (Bandung Command Center). Rasa tanggung jawab yang tinggi dalam kebijakan Smart City jelas adanya, Para aparatur yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah menjalankan tupoksi berdasarkan arahan dan roadmap yang dibuat oleh Walikota Bandng untuk menunjang Smart City. Salah satu bentuk tanggung jawab Dinas Komuniksi dan Informatika yaitu seperti merancang kebijakan untuk Smart City dan merealisasikan serta mengimplemtasikan Smart Government.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung sudah terciptanya sinergitas antara seorang pimpinan dan bawahan dalam birokrasi, baik itu mengenai kesepahaman persepsi tentang kebijakan tersebut, maupun tata cata peng-implementasian nya. Seperti halnya Walikota Bandung sudah memberikan pemahaman dengan cara apapun kepada bawahannya dengan tujuan untuk persamaan persepsi, visi serta misi yang telah di tentukan bersama. Jika tidak maka pelaksanaan ini akan kabur dengan sendirinya sehingga akan menimbulkan gaya komunikasi yang tidak baik dan akan berakibat kepada ketimpangan implementasi.

Berikut penuturan Kepala Bidang sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 28 November 2016

“Sudah terjalin birokrasi yang cukup baik, karena sekaran sudah terjalin sinergitas di setiap SKPD atau Dinas-dinas, sudah terdapat BCC mini yang langsung terkoneksi ke BCC pusat yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan dengan adanya tenaga-tenaga IT yang kompeten dalam menjalankan sistem atau aplikasi Smart

City sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi.”

Hambatan Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung

Hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung bisa dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan Struktur birokrasi yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

- a. Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang.
- b. Berkaitan dengan sosialisasi yang belum merata mengakibatkan terhambatnya pengimplementasian kebijakan smart city kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Kurangnya publikasi sistem dan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sistem maupun aplikasi tersebut.

2. Sumber daya

- a. Terkait Staff, permasalahan sumber daya terkait sataff berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi selaku implementor dari smart city di kota bandung masih adanya kendala ataupun permasalahan mengenai staff dimana di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Bandung masih kekurangan staff di bidang Ilmu Teknologi sedangkan staff yang ahli di bidang ilmu teknologi ini sangat penting demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Smart City yang merupakan sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan, namun penambahan staff saja tidak cukup dalam menangani permasalahan ini dibutuhkannya staff yang ahli dan mempunyai kemampuan di bidang ilmu teknologi agar tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan pengimplementasian smart city.

Hal ini di pertegas oleh penuturan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika, 28 November 2016 :

“Penempatan petugas dalam menjalankan program smart city belum sesuai dengan skill yang dimilikinya. Baru dalam tahap penempatan-penempatan dan SDM

yang handal tentang IT sehingga untuk pembenahan pemerintah Kota Bandung merekrut tenaga outsourcing khususnya dalam bidang IT. Dalam perekrutan tenaga Outsourcing kami melakukan seleksi yang sangat ketat, jumlah pendaftar 1000 dan yang dipilih hanya 5. Sehingga kami yakin bahwa tenaga Outsourcing kami khusus nya dalam bidang IT itu berkompeten dan sangat menunjang dalam mengelola BCC”.

- b. Terkait Informasi, permasalahan sumber daya dalam indikator informasi terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program Smart City. Ini menjadi salah penghambat keefektifan program smart city dikarenakan di Dinas Komunikasi dan Informasi ini tidak semua aparatur paham akan teknologi sedangkan di dinas komunikasi dan informasi sendiri aparatur dituntut untuk paham akan arahan yang diberikan kepala daerah dan paham akan ilmu teknologi mengenai smart city sebagai penunjang dari arahan yang diberikan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan program smart city, karena tidak bisa disepelekan lagi aparatur pelaksana smart city harus paham akan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan paham mengenai ilmu teknologi khususnya mengenai program aplikasi-aplikasi penunjang smart city.

Hal ini di pertegas oleh penuturan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika, 28 November 2016 :

“Pemahaman aparatur mengenai Smart City tentunya belum semua, sehingga aparatur yang belum paham mengenai Smart City harus mengikuti diklat khusus. Di adakannya diklat khusus oleh Pemerintah kota Bandung sendiri mengenai Smart City yang bertujuan untuk meningkatkan SDM. Karena Smart City ini akan berjalan jika pemerintahan nya pun menjadi Smart Government.”

Dengan begitu pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program smart city sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan smart city.

- c. Terkait infrastruktur, selain dari sisi pembangunannya, masih ada banyak

masalah yang perlu dibenahi. Salah satu isu yang cukup penting adalah masalah kabel yang menjadi infrastruktur komunikasi utama masyarakat yang saat ini masih berantakan. Layanan internet bagi masyarakat juga belum merata dan optimal. Padahal, infrastruktur merupakan hal yang paling fundamental karena ketika infrastruktur sudah rapi, pembangunan yang ada "di atasnya" bisa dilakukan dengan cepat.

Hal ini di pertegas oleh penuturan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika, 28 November 2016 :

"Mengenai infrastruktur juga Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai cara untuk memperbaikinya dan masih terus berusaha dalam melakukan perbaikan infrastruktur, salah satunya Pemerintah Kota Bandung berencana untuk membuat Dakting, dakting yaitu penurunan kabel-kabel listrik melalui pipa ke dalam bawah tanah untuk keamanan masyarakat dan estetika kota serta membuat MCF (microcellful), gunanya untuk penyebar cinyal HandPhone semua itu program-program yang dilakukan oleh Diskominfo untuk menunjang Smart City"

3. Disposisi

Hambatan dalam pengimplementasian smart city dilihat dari disposisinya sejauh ini tidak ditemukan adanya hambatan. Hal ini dapat terlihat dari sikap positif yang ditunjukkan oleh aparatur dalam melaksanakan program smart city.

4. Struktur Birokrasi

Hambatan dari struktur birokrasi diantaranya Operating Prosedur belum dapat dipahami oleh pegawai Pemerintahan Kota Bandung khususnya oleh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informasi, sehingga Pemerintah Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program Smart City tersebut untuk para pegawai khususnya pegawai yang berada di Dinas komunikasi dan Informatika karena Dinas ini sebagai implementor kebijakan smart city ini.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung belum tersosialisasi secara merata dan dikomunikasikan dengan baik terutama kepada SKPD atau dinas-dinas

lainnya sehingga banyak masyarakat kota Bandung itu sendiri yang belum mengetahui tentang smart city. Dalam mensosialisasikan mengenai program Smart City membutuhkan proses yang panjang dan harus didukung pula oleh pemerintah dan warganya. Meskipun pemerintah sudah meluncurkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung Bandung sebagai Smart City tetap saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk penerapannya sampai kepada warga Bandung.

Dalam menunjang Smart City tentu saja warga Kota Bandung harus menjadi Smart People, cukup sulit untuk menjadikan warga Bandung seluruhnya menjadi Smart People sehingga Walikota Bandung yaitu Pak Ridwan Kamil mengusulkan pemerintah Kota Bandung harus menjadi Smart Government dengan harapan apabila Smart Government sebagai implementor Smart City ini berhasil, dapat dengan mudah juga menjadikan masyarakat Kota Bandung menjadi Smart People.

Dari aspek Sumber Daya, dengan ketersediaan teknologi dan alat-alat penunjang teknologi tersebut berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota seperti kamera CCTV dan GPS sehingga dapat dianalisis dengan aplikasi cerdas untuk mempermudah pelayanan. Mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) Bandung mengadakan program smart city ini bekerja sama dengan para praktisi, teknokrat, budayawan, dengan kalangan pendidikan juga dengan unsur elemen masyarakat sehingga di kota Bandung dibentuklah Dewan Smart City.

Salah satu implementasi dari seluruh global gabungan dari semua unsur salah satunya adalah Dinas yang harus menjalani. Paling depan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, karena terdapat unsur IT didalamnya sebagai penunjang Smart City.

Dari aspek Disposisi, dukungan dari para implementor pun sudah optimal sampai saat ini mereka masih terus berusaha untuk menjadikan Pemerintah Kota Bandung sebagai Smart Government karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab juga terhadap pelaksanaan Smart City di Kota Bandung dengan cara menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan arahan Roadmap dari Walikota Bandung.

Dari aspek Struktur Birokrasi, Sistem birokrasi yang sangat mendukung dalam program Smart City adalah terciptanya Smart Government dan Smart People sehingga Smart City bisa berhasil.

Jika kedua aspek itu saling berkorelasi maka akan sangat menunjang terhadap Smart City. Sampai detik ini sistem birokrasi yang berada di Pemerintahan Kota Bandung adalah yang terbaik yang sudah dilakukan.

2. Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan Smart City Bandung adalah:

Implementator perlu melakukan branding Smart City. Hal mendesak yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan Smart City Kota Bandung adalah membuat branding Kota Bandung. Branding atau city branding dapat diartikan sebagai strategi atau proses pembentukan merek suatu kota dalam berbagai bentuk media promosi, agar dikenal oleh masyarakat luas. Branding dalam konteks Smart City Bandung diperlukan untuk sosialisasi dan meningkatkan motivasi mensukseskan smart city, atau secara sederhana diperlukan sebagai semangat untuk bergerak bersama.

Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Bandung Smart City. Penyelarasan kebijakan dan strategi Bandung Smart City dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan Kota Bandung. Road Map Bandung Smart City diintegrasikan dalam RPJMD Kota, sehingga apabila kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, maupun program tercakup dalam RPJMD Kota Bandung tahap ketiga, maka prakarsa maupun inisiatif Bandung Smart City dapat diakomodasi dalam penyusunan RKPD Kota Bandung maupun Rencana Strategis SKPD terkait. Dengan demikian implementasi Bandung Smart City melalui program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dapat terwujud semakin baik.

Penataan Unsur Bandung Smart City Penataan unsur Bandung Smart City meliputi kelembagaan, jejaring, dan sumberdaya smart city. Penataan Kelembagaan Bandung Smart City harus mempertimbangkan organisasi, regulasi, maupun norma/etika/budaya. Pertimbangan organisasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan arahan strategis pembangunan dan pengembangan Bandung Smart City adalah Dewan Smart City Bandung. Dewan Smart City berperan sebagai mitra Pemerintah Kota Bandung (Government-CIO) dalam pembangunan dan pengembangan smart city. Pembentukan 'Dewan Smart City Bandung' perlu memperhatikan kapasitas, peran, dan dukungan anggaran. Regulasi Bandung Smart City perlu disusun terutama terkait berbagai sumberdaya TIK, pendanaan, dokumentasi, maupun pedoman kerjasama/investasi bagi pihak ketiga. Bandung Smart City juga perlu memperhatikan norma/etika/budaya setempat

yang berdasar profesionalisme. Penataan jejaring Bandung Smart City dilakukan melalui interaksi dan sinergi pemangku kepentingan: Academic, Business, Community, Government, dan Media. Penataan sumberdaya Bandung Smart City dilakukan melalui penataan brainware, software, dan hardware. Penataan brainware perlu memperhatikan kepakaran, keahlian, kompetensi, dan ketrampilan. Penataan software dan hardware perlu memperhatikan interoperabilitas, skalabilitas, dan realibilitas.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Herdiansyah, Harish. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Bandung: Gava Media.
- Ismail, Nawawi. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.
- Kahya, Zenju. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Bandung: Gava Media.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schermerchorn, Jr. 1994. *Management*. International Studies Version.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Undang-Undang:**
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 BAB XXI Pasal 386-390 Tentang inovasi Pemerintah Daerah.

Website

- <https://lestarinurbudi.wordpress.com/2016/06/08/bandung-smart-city/> diakses bulan Januari 2017 pukul 05.20 WIB.
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, Diakses tanggal 25 November 2016.
- <https://lestarinurbudi.wordpress.com/2016/06/08/bandung-smart-city/> diakses pada tanggal 28 November 2016.

